

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam melakukan penataan Pedagang Kaki Lima, selanjutnya disebut PKL, masih kesulitan. Disamping ketidaktaatan PKL yang masih menempati area trotoar, bisa jadi dalam pengaturan hukumnya yang bermasalah dan/atau dari kebijakan penetapan lokasi PKL yang kurang tepat oleh Pemerintah Daerah. Maka Apakah pengaturan penataan pedagang kaki lima Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014?; dan Bagaimana kebijakan hukum yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menangani pedagang kaki lima yang menempati area trotoar?.

Dilakukannya penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang – undangan, dan sosiologi hukum dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan literatur baik dari karya ilmiah dan/atau peraturan perundang – undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi ke lapangan yang diikuti dengan dokumentasi hasil observasi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara kepada responden yang telah ditentukan, Sedangkan Teknik mengumpulkan data sekunder dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan memberikan gambaran – gambaran (deskripsi), dengan kata – kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data yang diperoleh.

Maka dapat diperoleh hasil penelitian yakni Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 101 Tahun 2022 tidak sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014. Maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan membuat kebijakan hukum dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan yang terbaru terkait penataan PKL, dengan menghapus sebagian lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai lahan berjualan PKL, terutama lokasi yang mempergunakan trotoar, dan memasukkan lokasi terbaru yang sesuai dengan peruntukannya.

Kata Kunci : Penataan PKL, Trotoar, Kebijakan Hukum

ABSTRACT

The Pamekasan Regency Government in organizing street vendors, hereinafter referred to as PKL, is still having difficulties. Apart from the disobedience of street vendors who still occupy sidewalk areas, there could be problems with legal regulations and/or inappropriate policies for determining the location of street vendors by the Regional Government. So, are the arrangements for street vendors in Pamekasan Regency in accordance with Minister of Public Works Regulation Number 03/PRT/M/2014?; and What are the legal policies taken by the Regional Government of Pamekasan Regency in dealing with street vendors who occupy sidewalk areas?

Empirical juridical research was carried out using a statutory approach and legal sociology by collecting data through interviews, observations and literature from both scientific works and/or applicable laws and regulations. The technique for collecting primary data is carried out by observing in the field followed by documenting the results of the observation, then continuing with conducting interviews with predetermined respondents. Meanwhile, the technique for collecting secondary data is by collecting, documenting books, journals, scientific papers, dictionaries, encyclopedias and documents - documents relating to research problems sourced from library materials. Then it is analyzed by providing descriptions, using words for the findings and therefore prioritizing the quality of the data obtained.

So the research results can be obtained, namely that Article 13 paragraph (1) of the Pamekasan Regency Regent Regulation Number 101 of 2022 is not in accordance with Article 17 of the Minister of Public Works Regulation Number 03/PRT/M/2014. So the Pamekasan Regency Government made a legal policy by making changes to the latest Pamekasan Regency Regent Regulation regarding the arrangement of street vendors, by removing some locations that are not designated as land for selling street vendors, especially locations that use sidewalks, and inserting new locations that are in accordance with their designation.

Keywords : PKL Arrangement, Sidewalks, Legal Policy